



DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

PERJANJIAN KINERJA (PK)



TAHUN 2021

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan di dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun Anggaran 2021 sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun Anggaran 2021 merupakan perubahan capaian sasaran dari program kerja tahun 2021 yang sesuai dengan penjabaran dari perencanaan strategik Tahun 2020-2024 dan dilaksanakan karena adanya perubahan pejabat, perubahan alokasi anggaran serta perubahan rencana pencapaian sasaran dari program kerja tahun 2021 yang diakibatkan karena wabah covid-19. Untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon I, maka Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon I dengan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

Perjanjian Kinerja berisi perubahan indikator kinerja program (*key performance indicators*) sebagaimana tertuang dalam Draft Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik dan dapat menjadi acuan dan referensi dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada masa mendatang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2021.

Jakarta, Januari 2021

DIREKTUR
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API



Ir. DANTO RESTYWAN, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640829 199403 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	I-1
2. Maksud dan Tujuan	I-2
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	II-1
2. Struktur Organisasi	II-2
a. Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan	II-4
b. Subdirektorat Lalu Lintas	II-4
c. Subdirektorat Angkutan	II-5
d. Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha	II-7
e. Subbagian Tata Usaha	II-7
3. Sumber Daya Manusia	II-7
BAB III PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API TAHUN 2021	
1. Arahkan Presiden	III-1
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) IV 2020-2024	III-2
3. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan	III-3

4. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	III-5
5. Visi dan Misi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.....	III-7
6. Tujuan.....	III-7
7. Sasaran	III-7
8. Strategi	III-8
9. Kebijakan Umum	III-10
10. Program	III-10
11. Sasaran Indikator Kinerja Utama	III-12
12. Kegiatan Tahun 2021	III-13
13. Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun 2021	III-19

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah SDM Direktorat Lalu Lintas & Angkutan KA	II-7
Tabel 2	Jumlah SDM Dit. LLAKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-8
Tabel 3	Jumlah SDM Dit. LLAKA Berdasarkan Golongan	II-9
Tabel 4	Indikator Kinerja Utama	III-9
Tabel 5	Persentase Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha	III-14
Tabel 6	Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA	III-15
Tabel 7	Persentase Kedatangan KA tepat waktu	III-15
Tabel 8	Jumlah Penumpang KA terangkut	III-15
Tabel 9	Jumlah Barang KA terangkut	III-16
Tabel 10	Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA	III-16
Tabel 11	Persentase penetapan/persetujuan/perizinan bidang LLAKA yang tepat waktu	III-17
Tabel 12	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	III-17
Tabel 13	Persentase Penyerapan Anggaran (%)	III-18
Tabel 14	Anggaran Kegiatan Tahun 2021	III-19

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah Perjanjian terhadap rencana pencapaian sasaran dari program kerja Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 dan merupakan suatu Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dalam mewujudkan target pada tahun 2021 berdasar sumber daya Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2021 terdapat indikator kinerja program (*key performance indicators*) yang berbasis outcome sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 tersebut maka setiap jajaran unit kerja Eselon II wajib menyusun penetapan kinerja. Oleh karena itu pada Tahun 2021 ini Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan mengacu pada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Presiden.

Perjanjian Kinerja ini selanjutnya akan ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2021 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pada Tahun 2021 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melaksanakan 1 (Satu) program utama yang terdapat dalam Renstra 2020-2024 yaitu *Program Infrastruktur Konektivitas*.

Dengan program utama tersebut di atas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Perjanjian

Kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada tahun 2021.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk melaksanakan dan memenuhi indikator-indikator kinerja utama yang telah ditetapkan berdasarkan acuan pemetaan dari Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan untuk melakukan evaluasi dari hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menyusun dan menetapkan Indikator-indikator Kinerja yang akan di jadikan sebagai dasar dalam rangka melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Target pencapaian terhadap sasaran pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang pada akhirnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2021.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah

Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang didalamnya terdapat unit kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api secara legalitas kedudukannya dibawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan

kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;

- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

2. Struktur Organisasi

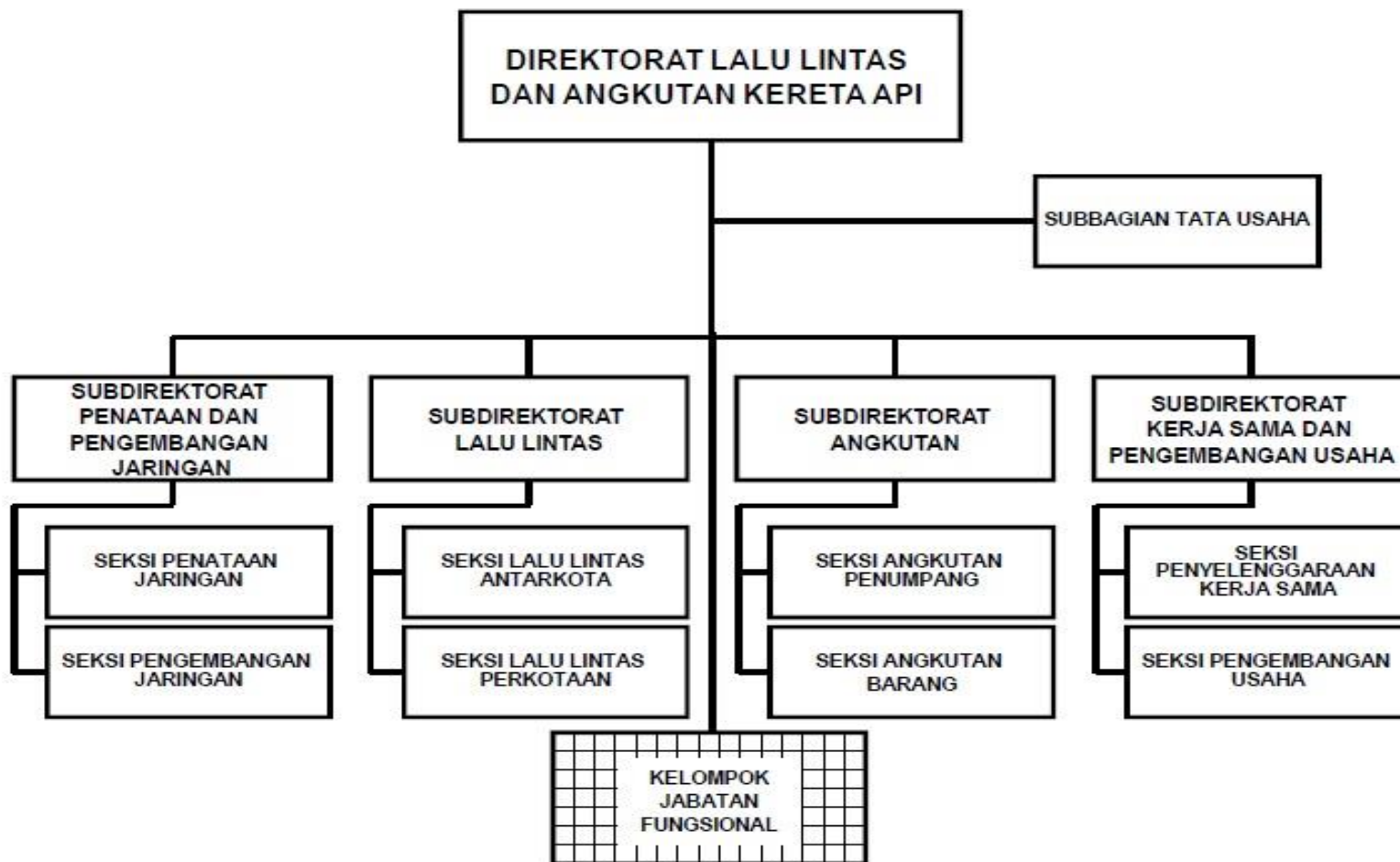
Struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM. 122 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api terdiri dari Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan, Subdirektorat Lalu lintas, Subdirektorat Angkutan, Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha dan Subbagian Tata Usaha, berikut ini adalah gambar struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas dan angkutan Kereta Api.

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 122 Tahun 2018



a. Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan

Subdirektorat Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Subdirektorat Jaringan terdiri atas:

- 1) Seksi Penataan Jaringan;
- 2) Seksi Pengembangan Jaringan.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

b. Subdirektorat Lalu Lintas

Subdirektorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Subdirektorat Lalu Lintas terdiri atas:

- 1) Seksi Lalu Lintas Antarkota;
- 2) Seksi Lalu Lintas Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

c. **Subdirektorat Angkutan**

Subdirektorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang.

Subdirektorat Angkutan terdiri atas:

- 1) Seksi Angkutan Penumpang;
- 2) Seksi Angkutan Barang.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang.

d. **Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha**

Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan kerja sama dan pengembangan di bidang perkeretaapian baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha terdiri atas:

- 1) Seksi Penyelenggaraan Kerjasama;
- 2) Seksi Pengembangan Usaha.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;

- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kerja sama dan pengembangan bidang perkeretaapian.

e. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan rumah tangga Direktorat

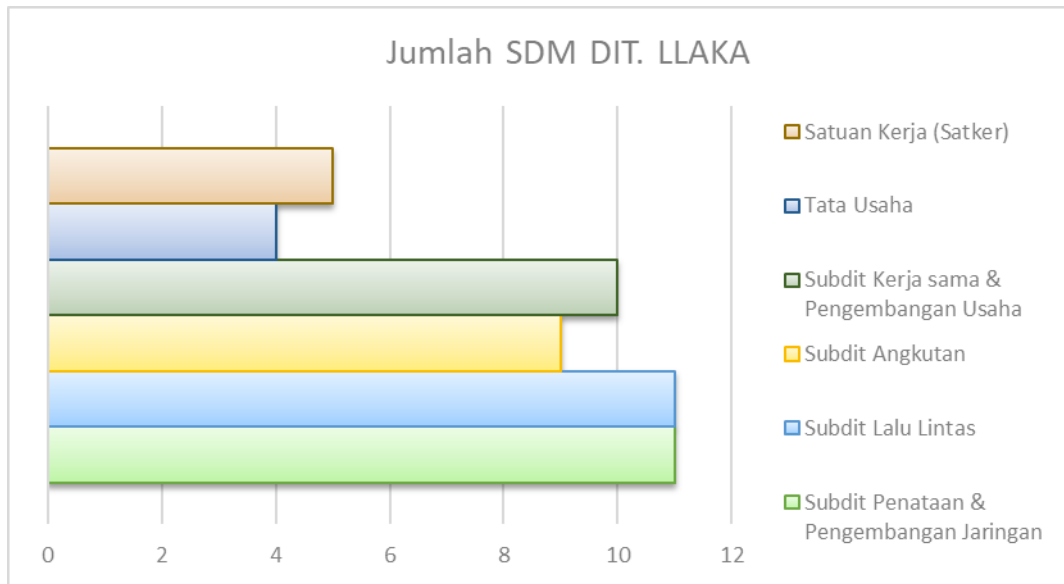
3. Sumber Daya Manusia

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api memiliki sumber daya manusia sebanyak 50 orang dengan penempatan pada subdirektorat-subdirektorat serta pada subbagian tata usaha. Sebanyak 5 orang diperbantukan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Berdasarkan jumlah pegawai yang terbagi dalam subdirektorat yang ada, masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah SDM Direktorat Lalu Lintas & Angkutan KA

No	Bagian	Jumlah
1	Subdit Penataan & Pengembangan Jaringan	11
2	Subdit Lalu Lintas	11
3	Subdit Angkutan	9
4	Subdit Kerja sama & Pengembangan Usaha	10
5	Tata Usaha	4
6	Satker & Unit Pelaksana Teknis (UPT)	5
Jumlah SDM		50

Grafik 1. Grafik Jumlah SDM Direktorat Lalu Lintas & Angkutan KA

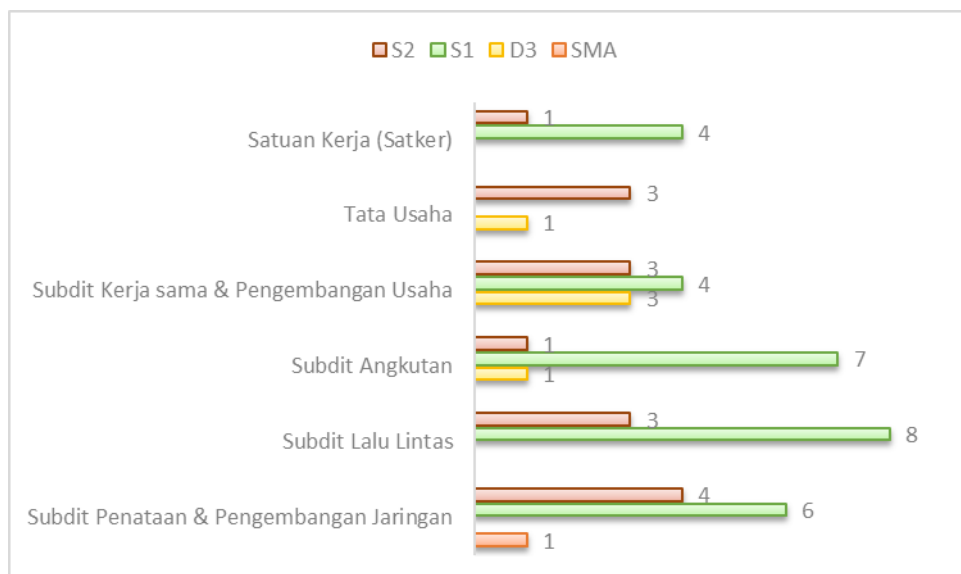


Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 2. Jumlah SDM Dit. LLAKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bagian	SMA	D3	S1	S2
1	Subdit Penataan & Pengembangan Jaringan	1		6	4
2	Subdit Lalu Lintas			8	3
3	Subdit Angkutan		1	7	1
4	Subdit Kerja sama & Pengembangan Usaha		3	4	3
5	Tata Usaha		1		3
6	Satker & Unit Pelaksana Teknis (UPT)			4	1
Jumlah		1	5	29	15

Grafik 2. Grafik Jumlah SDM Dit. LLAKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

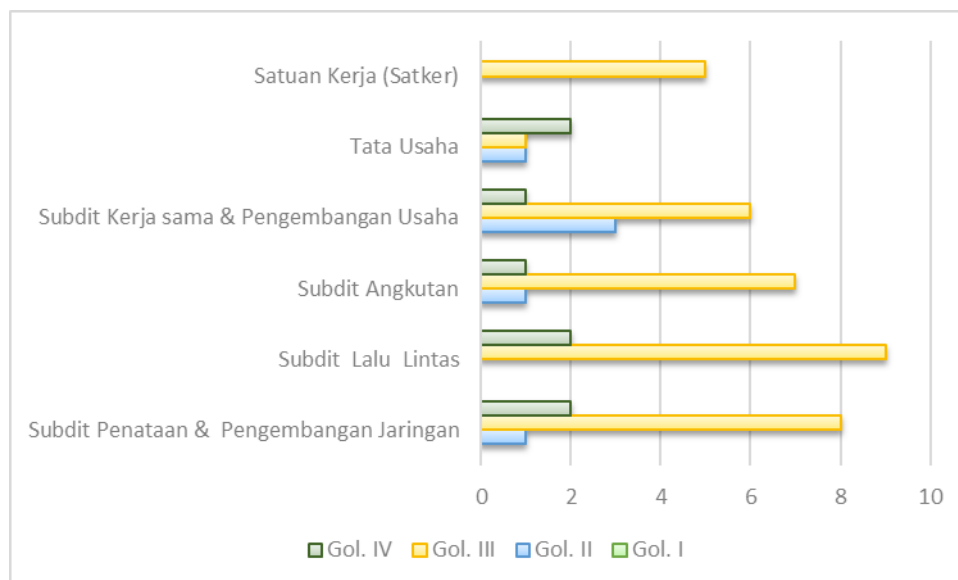


Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api berdasarkan Tingkat Golongan :

Tabel 3. Jumlah SDM Dit. LLAKA Berdasarkan Golongan

No	Bagian	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
1	Subdit Penataan & Pengembangan Jaringan	1	8	2
2	Subdit Lalu Lintas		9	2
3	Subdit Angkutan	1	7	1
4	Subdit Kerja sama & Pengembangan Usaha	3	6	1
5	Tata Usaha	1	1	2
6	Satker & Unit Pelaksana Teknis (UPT)		5	
Jumlah		6	36	8

Grafik 3. Grafik Jumlah SDM Dit. LLAKA Berdasarkan Golongan



Berdasarkan jumlah SDM tersebut maka pencapaian kinerja kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menggunakan SDM sebagai input dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga sebagai faktor pendukung tercapainya output dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang ada pada masing-masing Sub Direktorat yang ada dilingkungan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan tersebut nantinya akan menjadi kontrak kinerja jabatan fungsional umum seluruh pegawai di lingkungan kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN KERETA API TAHUN 2021

1. Arahan Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu, sebagai berikut:

a. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.;

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama dan talenta global.

c. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law (membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus).

d. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

e. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) IV 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJP 2005-2025. Target pencapaian pembangunan dalam RPJPN adalah pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025, sasaran RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024 yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024 sebagai berikut:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan

Kementerian Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020-2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Visi :

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesi Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif, serta berdaya saing internasional.

Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Relevansi perwujudan Visi Presiden dalam Sektor Perhubungan ini apabila dilihat dalam konteks 7 Agenda Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Pertama, konektivitas nasional memberikan andil yang strategis dan menentukan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, terutama terkait ketimpangan akses dan pemerataan pembangunan antar kawasan Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, maupun antar kesenjangan pembangunan secara sektoral.

Kedua, konektivitas nasional mampu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terutama dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan konsep Tol Laut, mengurangi disparitas ekonomi, peningkatan daya saing perekonomian antar wilayah, serta pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar.

Ketiga, konektivitas nasional mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, sehingga cita-cita nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan dapat tercapai.

Keempat, melalui konektivitas nasional, strategi pembangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dapat dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta sentra-sentra kegiatan ekonomi produktif di suatu wilayah.

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan **Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah**, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

Kementerian Perhubungan melaksanakan **Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4** dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan **konektivitas** antar wilayah;

2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja **pelayanan** jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan **keselamatan dan keamanan** transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut diatas, sudah selaras dan sejalan dengan Arahan Presiden untuk melaksanakan pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang tertuang dalam 9 (sembilan) Misi Presiden.

4. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Berdasarkan mandat, penugasan, isu strategis dan perkembangan lingkungan strategis, dan kondisi dari perkeretaapian pada saat ini, maka untuk perumusan arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

“Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Adapun yang dimaksud dengan:

Handal diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu; dengan konektivitas, kapasitas, dan regularitas yang memadai, serta didukung oleh sarana, prasarana mencukupi dan terpelihara.

Berdaya Saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang efisien sehingga dapat berkompetisi dengan moda transportasi lainnya secara sehat dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, yang didukung oleh SDM pendukung yang profesional, mandiri, dan produktif.

Berintegrasi diindikasikan oleh tersedianya jaringan dan layanan transportasi kereta api penumpang dan barang yang terintegrasi dengan moda lainnya dalam suatu sistem intermoda/multimoda dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah yang menentukan pola interaksi sosial ekonomi yang dilayani.

Berteknologi diindikasikan oleh penerapan teknologi yang sesuai perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Terjangkau diindikasikan oleh tersedianya layanan kereta api yang terjangkau oleh setiap lapisan ekonomi dan semua golongan sosial masyarakat secara berkeadilan di seluruh wilayah NKRI yang membutuhkan kehadiran layanan kereta api.

Dalam rangka perwujudan visi tersebut, maka dirumuskan sejumlah misi yang akan dilaksanakan (mission to be accomplished) oleh Ditjen Perkeretaapian pada periode 2020- 2024, yakni:

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif;
- c. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.

5. Visi dan Misi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dalam pelaksanaan kegiatannya memiliki Visi :

Terwujudnya lalu lintas dan angkutan kereta api yang handal, aman, nyaman, selamat dan terjangkau.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api memiliki Misi :

- a. Meningkatkan efisiensi pergerakan penumpang dan barang dalam perspektif kompetisi dan integrasi antarmoda dan intermoda.
- b. Meningkatkan Pangsa Pasar Perkeretaapian.
- c. Melayani angkutan sesuai dengan karakteristiknya dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perkeretaapian.
- e. Menyediakan pelayanan dengan tarif terjangkau dan ramah lingkungan.

6. Tujuan

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.
- b. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal.
- c. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal.

7. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sasaran pembangunan Perkeretaapian yang akan dicapai setiap tahunnya diprioritaskan kepada :

- a. Sasaran Program yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur.
- b. Sasaran program yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan.

- c. Sasaran program yang ingin dicapai dalam Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal.

8. Strategi

Rumusan mengenai tujuan dan sasaran dari program Infrastruktur Konektivitas yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api disampaikan sebagai berikut.

- a. Peningkatan akses jalur kereta api ke kota-kota utama di Indonesia, melalui strategi antara lain : Pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera, Jawa & Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua;
- b. Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi, melalui strategi antara lain: Membangun jalur kereta akses ke bandara dan pelabuhan;
- c. Peningkatan kehandalan pengoperasian kereta api, melalui strategi antara lain :
 - 1) Meningkatkan kinerja pengoperasian kereta api;
 - 2) Meningkatkan ketepatan waktu keberangkatan/ kedatangan kereta api.
- d. Penerapan teknologi baru bidang perkeretaapian
- e. Peningkatan kontribusi moda kereta api dalam angkutan penumpang perkotaan, melalui strategi antara lain :
 - 1) Meningkatkan penyediaan layanan kereta api perkotaan.
 - 2) Meningkatkan kapasitas jalur kereta api perkotaan.
- f. Peningkatan daya saing moda kereta api, melalui strategi antara lain:
 - 1) Meningkatkan pangsa muatan angkutan penumpang kereta api;
 - 2) Meningkatkan pangsa muatan angkutan barang kereta api.
- g. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan angkutan kereta api yang disediakan oleh Pemerintah, melalui strategi antara lain:
 - 1) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PSO kereta api;
 - 2) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan KA perintis;

9. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum yang dijalankan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses jalur kereta api ke kota-kota utama di Indonesia;
- b. Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi;
- c. Peningkatan kehandalan pengoperasian kereta api;
- d. Peningkatan kontribusi moda kereta api dalam angkutan penumpang perkotaan;
- e. Peningkatan daya saing moda kereta api;
- f. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan angkutan kereta api yang disediakan oleh Pemerintah;

10. Program

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menjalankan Program Utama Infrastruktur Konektivitas, dengan melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Berdasarkan program tersebut Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
 - 1) Perancangan Geodatabase Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api;
 - 2) Studi Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA antara Semarang - Kudus - Juana - Lasem - Bojonegoro;
 - 3) Studi Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA antara Cipatat - Sasaksaat – Cilame;
 - 4) Studi Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Segmen Balikpapan - Samarinda dalam rangka mendukung Ibukota Negara;
 - 5) Studi Pengembangan Aplikasi dan Penambahan Fitur Sistem Perizinan Online di Bidang Perkeretaapian;
 - 6) Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Reaktivasi Jalur Kereta Api Segmen Duduk Sampean - Gresik – Indro;

- 7) Penyusunan dan Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Sumatera Selatan;
 - 8) Pengolahan Data Warehouse Pemantauan Kinerja di Bidang Angkutan Kereta Api;
 - 9) Belanja Jasa Lainnya;
 - 10) Pendampingan Pelaksanaan Perancangan Dasar Jalur Kereta Api Tambahan Jakarta-Surabaya;
 - 11) Studi Kelayakan, Survei Investigasi dengan Rancangan Dasar untuk Kereta Api Bandara YIA-KSPN Borobudur;
 - 12) FS dan SID Reaktivasi Jalur KA Krenceng-Anyer Kidul.
- b. Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- 1) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA;
 - 2) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Lalu Lintas Kereta Api;
 - 3) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Angkutan KA;
 - 4) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Kerja Sama dan Pengembangan usaha dalam Rangka penyelenggaraan perkeretaapian.
- c. Monitoring dan Evaluasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- 1) Monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - 2) Monitoring dan evaluasi penataan jaringan jalur kereta api;
 - 3) Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta;
 - 4) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api;
 - 5) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi angkutan perintis dan subsidi angkutan motor tahun anggaran 2020;
 - 6) Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM);

- 7) Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api;
 - 8) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan kereta;
 - 9) Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan di Bidang Angkutan KA;
 - 10) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian;
 - 11) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan KPBU di Bidang;
 - 12) Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha;
 - 13) Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana;
 - 14) Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana perkeretaapian
- d. Pelaksanaan Subsidi Angkutan Motor melalui Kereta Api;
- 1) Pelaksanaan Subsidi Angkutan Motor Melalui Kereta Api;
 - 2) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran;
 - 3) Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2021;
 - 4) Perawatan alat pemantauan di stasiun KA Perlintasan Sebidang T.A.2021.
- e. Pelaksanaan Subsidi Perintis Kereta Api
Subsidi perintis KA Makassar-Parepare
- f. Grafik Perjalanan Kereta Api
Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)
- g. Bimbingan Teknis Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- 1) Bimbingan Teknis Penataan dan Pengembangan Jaringan;
 - 2) Bimbingan Teknis Lalu Lintas;
 - 3) Bimbingan Teknis Angkutan;
 - 4) Bimbingan Teknis Kerjasama dan Pengembangan Usaha.
- h. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TA 2020, Perjanjian Kinerja TA 2021, Laporan Tahunan (LAPTAH) TA 2020 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA 2021 DIT. LLAKA
 - 2) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat LLAKA.
- i. Penyusunan Laporan Keuangan
- 1) Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);
 - 2) Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK).
- j. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan
- 1) Administrasi Kegiatan Pelelangan;
 - 2) Administrasi Kegiatan Lainnya;
 - 3) Pengelolaan, pengolahan dan Penyajian Arsip Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA;
 - 4) Penyelenggaraan Langganan Daya dan Jasa Direktorat LLAKA;
 - 5) Adminitrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi DIT. LLAKA;
 - 6) Honor Operasional Satuan Kerja.
- k. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 1) Perawatan Kendaraan Bermotor;
 - 2) Langganann Daya dan Jasa;
 - 3) Administrasi Kegiatan Satker;
 - 4) Adminitrasi Kegiatan PSO;
 - 5) Sewa.

11. Sasaran Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan penetapan target pencapaian kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2021. Rincian target kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha	6 Dokumen
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian	2. Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA	90 %
		3. Persentase Kedatangan KA tepat waktu	74 %
		4. Jumlah Penumpang KA terangkut	220.925.002 Penumpang
		5. Jumlah Barang KA terangkut	57.264.938 Ton
		6. Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA	21 Dokumen
		7. Persentase penetapan/persetujuan/perizinan bidang LLAKA yang tepat waktu	100 %
3.	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat LLAKA	8. Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rp. 836.600.000.000
		9. Persentase Penyerapan Anggaran (%)	97,65 %

12. Kegiatan Tahun 2021

Mengacu pada sasaran tersebut di atas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melaksanakan **55** program/kegiatan yang di kelompokkan berdasarkan sasaran strategis, pengelompokan tersebut diantaranya :

- a. Meningkatkan KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Nasional.

Dalam mencapai sasaran ini, terdapat 1 Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, yaitu:

- 1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha.

Tabel 5. Persentase Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha

No	Kegiatan	Target
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha	6 Dokumen
	1) Studi Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA antara Semarang - Kudus - Juana - Lasem - Bojonegoro	
	2) Studi Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA antara Cipatat - Sasaksaat - Cilame	
	3) Studi Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Segmen Balikpapan - Samarinda dalam rangka mendukung Ibukota Negara	
	4) Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Reaktivasi Jalur Kereta Api Segmen Duduk Sampean - Gresik - Indro	
	5) Perancangan Geodatabase Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api	
	6) Pendampingan Pelaksanaan Perancangan Dasar Jalur Kereta Api Tambahan Jakarta-Surabaya	
	7) Studi Kelayakan, Survei Investigasi dengan Rancangan Dasar untuk Kereta Api Bandara YIA-KSPN Borobudur	
	8) FS dan SID Reaktivasi Jalur KA Krenceng-Anyer Kidul	

- b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian.

Dalam mencapai sasaran ini, terdapat 6 Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, yaitu:

1. Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA dengan target sebagai berikut :

Tabel 6. Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA

No	Kegiatan	Target
1	Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA	90 %
	1) Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api	

2. Persentase Kedatangan KA tepat waktu dengan target sebagai berikut :

Tabel 7. Persentase Kedatangan KA tepat waktu

No	Kegiatan	Target
1	Persentase Kedatangan KA tepat waktu	74 %
	1) Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)	

3. Jumlah Penumpang KA terangkut dengan target sebagai berikut :

Tabel 8. Jumlah Penumpang KA terangkut

No	Kegiatan	Target
1	Jumlah Penumpang KA terangkut	220.925.002 Penumpang
	1) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi angkutan perintis dan subsidi angkutan motor tahun anggaran 2020	
	2) Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Kereta Api	
	3) Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api	
	4) Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan di	

No	Kegiatan	Target
	Bidang Angkutan KA	
	5) Subsidi Perintis KA Makassar-Pare Pare	
	6) Bimbingan Teknis Angkutan	

4. Jumlah Barang KA terangkut dengan target sebagai berikut :

Tabel 9. Jumlah Barang KA terangkut

No	Kegiatan	Target
1	Jumlah Barang KA terangkut	57.264.938 Ton
	1) Pelaksanaan Subsidi Angkutan Motor melalui Kereta Api	
	2) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan kereta Api	

5. Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA dengan target sebagai berikut :

Tabel 10. Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA

No	Kegiatan	Target
1	Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA	7 Dokumen
	1) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA	
	2) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria di Bidang Lalu Lintas Kereta Api	
	3) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria di Bidang Angkutan KA	
	4) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, di Bidang Kerjasama dan Pembangunan Usaha dalam Rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian	
	5) Penyusunan dan Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Sumatera Selatan	
	6) Studi Pengembangan Aplikasi dan Penambahan Fitur Sistem Perizinan Online di Bidang Perkeretaapian	
	7) Pengolahan Data Warehouse Pemantauan Kinerja	

No	Kegiatan	Target
	di Bidang Angkutan Kereta Api	

6. Persentase penetapan/persetujuan/perizinan bidang LLAKA yang tepat waktu dengan target sebagai berikut:

Tabel 11. Persentase penetapan/persetujuan/perizinan bidang LLAKA yang tepat waktu

No	Kegiatan	Target
1	Persentase penetapan/persetujuan/perizinan bidang LLAKA yang tepat waktu	100 %
	1) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api	
	2) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian	
	3) Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian	
	4) Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana perkeretaapian	

- c. Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat LLAKA

Dalam mencapai sasaran ini, terdapat 2 Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, yaitu:

1. Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian dengan target sebagai berikut:

Tabel 12. Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

No	Kegiatan	Target
1	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rp. 836.600.000.000
	1) Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Verifikasi TAC)	

2. Persentase Penyerapan Anggaran (%) dengan target sebagai berikut :

Tabel 13. Persentase Penyerapan Anggaran (%)

No	Kegiatan	Target
1	Persentase Penyerapan Anggaran (%)	97.65 %
	1) Belanja Jasa Lainnya	
	2) Monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan jalur kereta api	
	3) Monitoring dan evaluasi penataan jaringan jalur kereta api	
	4) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan KPBU di Bidang Perkeretaapian	
	5) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	
	6) Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2020	
	7) Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA Perlintasan Sebidang TA.2021	
	8) Bimbingan Teknis Penataan dan Pengembangan Jaringan	
	9) Bimbingan Teknis Lalu Lintas	
	10) Bimbingan Teknis Kerjasama dan Pengembangan Usaha	
	11) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TA 2020, Perjanjian Kinerja TA 2021, Laporan Tahunan (LAPTAH) TA 2020 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA 2021 DIT. LLAKA	
	12) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat LLAKA	
	13) Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)	
	14) PengelolaaN Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)	
	15) Administrasi Kegiatan Pelelangan	
	16) Administrasi Kegiatan Lainnya	
	17) Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian Arsip Direktorat LLAKA	
	18) Adminitrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan	

No	Kegiatan	Target
	Reformasi Birokrasi DIT. LLAKA	
	19) Penyelenggaraan Langganan Daya dan Jasa Direktorat LLAKA	
	20) Honor Operasional Satuan Kerja	
	21) Perawatan Kendaraan Bermotor	
	22) Langganan Daya dan Jasa	
	23) Administrasi Kegiatan Satker	
	24) Admintrasi Kegiatan PSO	
	25) Sewa	

13. Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun 2021

Rencana kegiatan anggaran yang di anggarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Anggaran Kegiatan Tahun 2021

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kegiatan	Alokasi Dana PAGU
1	Perancangan Geodatabase Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api	1.643.827.000
2	Studi Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA antara Semarang - Kudus - Juana - Lasem - Bojonegoro	2.356.108.000
3	Studi Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA antara Cipatat - Sasaksaat - Cilame	2.853.000.000
4	Studi Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Segmen Balikpapan - Samarinda dalam rangka mendukung Ibukota Negara	3.231.450.000
5	Studi Pengembangan Aplikasi dan Penambahan Fitur Sistem Perizinan Online di Bidang Perkeretaapian	946.746.000
6	Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Reaktivasi Jalur Kereta Api Segmen Duduk Sampean - Gresik - Indro	1.307.045.000

No	Kegiatan	Alokasi Dana PAGU
7	Penyusunan dan Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Sumatera Selatan	7.527.547.000
8	Pengolahan Data Warehouse Pemantauan Kinerja di Bidang Angkutan Kereta Api	1.633.897.000
9	Belanja Jasa Lainnya	285.861.000
10	Pendampingan Pelaksanaan Perancangan Dasar Jalur Kereta Api Tambahan Jakarta-Surabaya	6.500.000.000
11	Studi Kelayakan, Survei Investigasi dengan Rancangan Dasar untuk Kereta Api Bandara YIA-KSPN Borobudur	2.977.622.000
12	FS dan SID Reaktivasi Jalur KA Krenceng-Anyer Kidul	2.500.000.000
13	Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA	308.710.000
14	Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Lalu Lintas Kereta Api	215.425.000
15	Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Angkutan KA	303.695.000
16	Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Kerja Sama dan Pengembangan usaha dalam Rangka penyelenggaraan perkeretaapian	213.970.000
17	Monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan jalur kereta api	252.341.000
18	Monitoring dan evaluasi penataan jaringan jalur kereta api	303.023.000
19	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api	300.604.000
20	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api	287.139.000
21	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi angkutan perintis dan subsidi angkutan motor tahun anggaran 2020	933.000.000

No	Kegiatan	Alokasi Dana PAGU
22	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Kereta Api	252.827.000
23	Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api	119.950.000
24	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan kereta Api	326.317.000
25	Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan di Bidang Angkutan KA	3.105.107.000
26	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian	268.781.000
27	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan KPBU di Bidang Perkeretaapian	337.912.000
28	Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian	194.748.000
29	Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Verifikasi TAC)	417.905.000
30	Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana perkeretaapian	241.145.000
31	Pelaksanaan Subsidi Angkutan Motor Melalui Kereta Api	33.600.000.000
32	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	3.100.279.000
33	Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2020	2.571.422.000
34	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA Perlintasan Sebidang TA.2021	1.865.584.000
35	Subsidi Perintis KA Makassar-Pare Pare	12.000.000.000
36	Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)	423.654.000
37	Bimbingan Teknis Penataan dan Pengembangan Jaringan	324.327.000

No	Kegiatan	Alokasi Dana PAGU
38	Bimbingan Teknis Lalu Lintas	311.004.000
39	Bimbingan Teknis Angkutan	353.647.000
40	Bimbingan Teknis Kerjasama dan Pengembangan Usaha	355.291.000
41	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TA 2020, Perjanjian Kinerja TA 2021, Laporan Tahunan (LAPTAH) TA 2020 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA 2021 DIT. LLAKA	593.607.000
42	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat LLAKA	240.865.000
43	Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)	111.144.000
44	Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)	98.839.000
45	Administrasi Kegiatan Pelelangan	36.730.000
46	Administrasi Kegiatan Lainnya	1.279.687.000
47	Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian Arsip Direktorat LLAKA	127.816.000
48	Administrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi DIT. LLAKA	317.441.000
49	Penyelenggaraan Langganan Daya dan Jasa Direktorat LLAKA	330.000.000
50	Honor Operasional Satuan Kerja	1.782.209.000
51	Perawatan Kendaraan Bermotor	184.038.000
52	Langganann Daya dan Jasa	83.134.000
53	Administrasi Kegiatan Satker	321.840.000

No	Kegiatan	Alokasi Dana PAGU
54	Admintrasi Kegiatan PSO	494.840.000
55	Sewa	439.800.000
Total		103.492.900.000

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api berpedoman Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2020-2024 dengan mengacu kepada RPJMN dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas masing-masing institusi. Untuk mencapai sasaran pembangunan perkeretaapian sebagaimana tertuang di dalam Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024 yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan maka Direktorat Lalu Lintas melaksanakan 3 (tiga) program utama yang tertuang dalam Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu:

1. Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian;
2. Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam bidang LLAKA;

Dengan melaksanakan program utama yaitu *Program Infrastruktur Konektivitas* diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menginduk kedalam visi dan misi presiden yang tertuang dalam program nawa cita.

Demikian Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2021 yang akan dilaksanakan dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api untuk mendorong keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. DANTO RESTYAWAN, MT**
Jabatan : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. ZULFIKRI, M.Sc.,DEA**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002

Pihak Pertama,

Ir. DANTO RESTYAWAN, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640829 199403 1 003

LAMPIRAN A
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024 DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
SK. 1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian	IKK. 1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha
SK. 2	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK. 2	Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA
		IKK. 3	Persentase Kedatangan KA tepat waktu
		IKK. 4	Jumlah Penumpang KA terangkut
		IKK. 5	Jumlah Barang KA terangkut
		IKK. 6	Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA
		IKK. 7	Persentase penetapan/persetujuan/perizinan bidang LLAKA yang tepat waktu
SK. 3	Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam bidang LLAKA	IKK. 8	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
		IKK. 9	Persentase Penyerapan Anggaran (%)

Jakarta, Januari 2021

DIREKTUR
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API



Ir. DANTO RESTYAWAN, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640829 199403 1 003

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha	Dokumen	6
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA	%	90
		Persentase Kedatangan KA Tepat Waktu	%	74
		Jumlah Penumpang KA Terangkut	Penumpang	220.925.002
		Jumlah Barang KA Terangkut	Ton	57.264.938
3	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan Dalam Bidang LLAKA	Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA	Dokumen	7
		Persentase Penetapan/Persetujuan/Perizinan Bidang LLAKA yang Tepat Waktu	%	100
4	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat LLAKA	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	836.600.000.000
		Persentase Penyerapan Anggaran	%	98

KEGIATAN

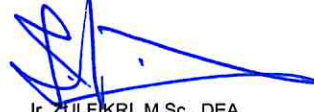
Program Infrastruktur Konektivitas

Anggaran

Rp. 103.492.900.000

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002

Jakarta, Januari 2021

DIREKTUR
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API



Ir. DANTO RESTYAWAN, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640829 199403 1 003

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan										Anggaran			
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		
		7. Persentase penetapan/persetujuan/perizinan bidang LLAKA yang tepat waktu	%	100	1.) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelebaran Kereta Api 2.) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian 3.) Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian 4.) Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana perkeretaapian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp	991,813,000	
3	Tertaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam bidang LLAKA	8. Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	836,600,000,000	1.) Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Veififikasi TAC)	69,700,000,000	139,450,000,000	209,150,000,000	278,900,000,000	348,850,000,000	418,350,000,000	488,050,000,000	557,750,000,000	627,450,000,000	697,200,000,000	766,900,000,000	#####	Rp	417,905,000
		9. Persentase Penyerapan Anggaran	%	98	1.) Belanja Jasa Lainnya 2.) Monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan jalur kereta api 3.) Monitoring dan evaluasi penataan jaringan jalur kereta api 4.) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan KPBU di Bidang Perkeretaapian 5.) Penyelenggaraan Anokutan Lebaran 6.) Penyelenggaraan Anokutan Natal dan Tahun Baru 7.) Perawatan Aki Pemantauan di Stasiun KA Perintis Sebidang TA.2021 8.) Bimbingan Teknis Penataan dan Pengembangan Jaringan 9.) Bimbingan Teknis Lalu Lintas 10.) Bimbingan Teknis Kerjasama dan Pengembangan Usaha 11.) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TA 2020, Perjanjian Kinerja TA 2021, Laporan Tahunan (LAPTAN) TA 2020 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA 2021 DIT. LLAKA 12.) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat LLAKA 13.) Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) 14.) Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) 15.) Administrasi Kegiatan Pelelangan 16.) Administrasi Kegiatan Lainnya 17.) Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian Arsip Direktorat LLAKA 18.) Administrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi DIT. LLAKA 19.) Penyelenggaraan Lngganan Daya dan Jasa Direktorat LLAKA 20.) Honor Operasional Satuan Kerja 21.) Perawatan Kendaraan Bermotor 22.) Lngganan Daya dan Jasa 23.) Administrasi Kegiatan Satker 24.) Administrasi Kegiatan PSO 25.) Sewa	0.00	1.21	3.84	8.00	9.58	23.99	38.21	46.49	65.46	77.69	87.97	98.00	Rp	16,149,034,000

Jakarta, Januari 2021

DIREKTUR LALU LINTAS DAN KERETA API


Ir. DANI RESTYAWAN, MT
Pembina Utama Muda (V/c)
NIP. 19640829 199403 1 003

LAMPIRAN D
PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API TAHUN 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran	
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan dan Peran Badan Usaha	Dokumen	6	Rp 23,369,052,000
		1.)	Perancangan Geodatabase Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api			Rp 1,643,827,000
		2.)	Studi Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA antara Semarang - Kudus - Juana - Lasem - Bojonegoro			Rp 2,356,108,000
		3.)	Studi Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA antara Cipatat - Sasaksaat - Cilame]]		Rp 2,853,000,000
		4.)	Studi Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Segmen Balikpapan - Samarinda dalam rangka mendukung Ibukota Negara			Rp 3,231,450,000
		5.)	Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Reaktivasi Jalur Kereta Api Segmen Duduk Sampean - Gresik - Indro			Rp 1,307,045,000
		6.)	Pendampingan Pelaksanaan Perancangan Dasar Jalur Kereta Api Tambahan Jakarta-Surabaya			Rp 6,500,000,000
		7.)	Studi Kelayakan, Survei Investigasi dengan Rancangan Dasar untuk Kereta Api Bandara YIA-KSPN Borobudur			Rp 2,977,622,000
		8.)	FS dan SID Reaktivasi Jalur KA Krenceng-Anyer Kidul			Rp 2,500,000,000
2	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	2	Persentase Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA	%	90	Rp 300,604,000
		1.)	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api			Rp 300,604,000
		3	Persentase Kedatangan KA tepat waktu	%	74	Rp 423,654,000
1.)	Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)			Rp 423,654,000		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
		4 Jumlah Penumpang KA terangkut	Penumpang	220,925,002	Rp 16,764,531,000
		1.) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Subsidi angkutan perintis dan subsidi angkutan motor tahun anggaran 2020			Rp 933,000,000
		2.) Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Kereta Api			Rp 252,827,000
		3.) Monitoring dan Evaluasi Tarif Angkutan Kereta Api			Rp 119,950,000
		4.) Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan di Bidang Angkutan KA			Rp 3,105,107,000
		5.) Subsidi Perintis KA Makassar-Pare Pare			Rp 12,000,000,000
		6.) Bimbingan Teknis Angkutan			Rp 353,647,000
		5 Jumlah Barang KA terangkut	Ton	57,264,938	Rp 33,926,317,000
		1.) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Angkutan kereta Api			Rp 326,317,000
		2.) Pelaksanaan Subsidi Angkutan Motor Melalui Kereta Api			Rp 33,600,000,000
		6 Jumlah Rumusan NSPK Bidang LLAKA	Dokumen	7	Rp 11,149,990,000
		1.) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalur KA			Rp 308,710,000
		2.) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Lalu Lintas Kereta Api			Rp 215,425,000
		3.) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Angkutan KA			Rp 303,695,000
		4.) Perumusan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Kerja Sama dan Pengembangan usaha dalam Rangka penyelenggaraan perkeretaapian			Rp 213,970,000
		5.) Penyusunan dan Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Sumatera Selatan			Rp 7,527,547,000
		6.) Studi Pengembangan Aplikasi dan Penambahan Fitur Sistem Perizinan Online di Bidang Perkeretaapian			Rp 946,746,000
		7.) Pengolahan Data Warehouse Pemantauan Kinerja di Bidang Angkutan Kereta Api			Rp 1,633,897,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran	
		7	Persentase penetapan/persetujuan/perizinan bidang LLAKA yang tepat waktu	%	100	Rp 991,813,000
			1.) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lintas Pelayanan Kereta Api			Rp 287,139,000
			2.) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perkeretaapian			Rp 268,781,000
			3.) Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perkeretaapian			Rp 194,748,000
			4.) Pemantauan dan Evaluasi Nilai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana perkeretaapian			Rp 241,145,000
3	Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam bidang LLAKA	8	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	836,600,000,000	Rp 417,905,000
			1.) Monitoring dan Evaluasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Verifikasi TAC)			Rp 417,905,000
		9	Persentase Penyerapan Anggaran (%)	%	98	Rp 16,149,034,000
			1.) Belanja Jasa Lainnya			Rp 285,861,000
			2.) Monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan jalur kereta api			Rp 252,341,000
			3.) Monitoring dan evaluasi penataan jaringan jalur kereta api			Rp 303,023,000
			4.) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan KPBU di Bidang Perkeretaapian			Rp 337,912,000
			5.) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran			Rp 3,100,279,000
			6.) Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2020			Rp 2,571,422,000
			7.) Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA Perlintasan Sebidang TA.2021			Rp 1,865,584,000
			8.) Bimbingan Teknis Penataan dan Pengembangan Jaringan			Rp 324,327,000
			9.) Bimbingan Teknis Lalu Lintas			Rp 311,004,000
			10.) Bimbingan Teknis Kerjasama dan Pengembangan Usaha			Rp 355,291,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
		11.) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TA 2020, Perjanjian Kinerja TA 2021, Laporan Tahunan (LAPTAH) TA 2020 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA 2021 DIT. LLAKA			Rp 593,607,000
		12.) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat LLAKA			Rp 240,865,000
		13.) Pengelolaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)			Rp 111,144,000
		14.) PengelolaaN Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)			Rp 98,839,000
		15.) Administrasi Kegiatan Pelelangan			Rp 36,730,000
		16.) Administrasi Kegiatan Lainnya			Rp 1,279,687,000
		17.) Pengelolaan, Pengolahan dan penyajian Arsip Direktorat LLAKA			Rp 127,816,000
		18.) Adminitrasi Ketatausahaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi DIT. LLAKA			Rp 317,441,000
		19.) Penyelenggaraan Langganan Daya dan Jasa Direktorat LLAKA			Rp 330,000,000
		20.) Honor Operasional Satuan Kerja			Rp 1,782,209,000
		21.) Perawatan Kendaraan Bermotor			Rp 184,038,000
		22.) Langganan Daya dan Jasa			Rp 83,134,000
		23.) Administrasi Kegiatan Satker			Rp 321,840,000
		24.) Adminitrasi Kegiatan PSO			Rp 494,840,000
		25.) Sewa			Rp 439,800,000